



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 101 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB II PERUBAHAN RENJA PD

### Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
  - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
  - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
  - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

#### Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

### BAB III

#### KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

#### Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

## BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

### Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 101

salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**

**Pembina Tk.I**

**NIP. 196901011999012001**



Pemerintah  
Kabupaten Bandung



# BUPATI BANDUNG PERATURAN

PERUBAHAN RENCANA  
KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANDUNG



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 122 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB II

### PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

#### Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;

- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
- e. Penutup; dan
- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
  - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
  - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
  - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun.

#### Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

### BAB III

#### KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

#### Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat

penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

#### BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

##### Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

##### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja Perubahan SKPD yang selanjutnya disebut Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja Perubahan SKPD ini terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun ini dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran, dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Soreang, Juni 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANDUNG**

**MOCHAMAD USMAN, S.Sos., M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**NIP.197110091991011001**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>I</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>II</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU</b>	<b>9</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja...	29
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....	34
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD.....	36
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>44</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja.....	45
3.3. Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.....	59
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>74</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>80</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bandung tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja Perubahan SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ini menyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2025. Renja Perubahan PD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ini menyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2025. Renja Perubahan PD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai SKPD, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih BEDAS, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”.

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan yang telah ditetapkan di atas, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan Misi Kelima: **“Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum”** sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Satpol PP**  
**Tahun 2025-2029**

Visi	Misi		Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih BEDAS, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas	M5	Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Pelindungan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2025, yang telah

ditetapkan melalui Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusun Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025;
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tranparasi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
42. Peraturan Bupati Bandung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022;
43. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Struktur Perangkat Daerah;
44. Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
45. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat sehingga berjalannya pembangunan antar desa, kecamatan, dan kabupaten, selain itu agar terlaksananya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah:

1. Terwujudnya Penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **Kata Pengantar**

#### **Daftar Isi**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja

3.3 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

### **BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung adalah penjabaran atas perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung pada tahun sebelumnya dan perkiraan untuk target tahun selanjutnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan tahun berjalan merupakan basis data untuk merencanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah selanjutnya. Keberhasilan suatu proses perencanaan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut berdampak pada capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun mendatang. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran Satpol PP Kabupaten Bandung dapat melalui tahapan berikut:

**2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan ini meliputi indikator

masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan indikator kinerja program, kegiatan, maupun sub kegiatan. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2024**

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PRESENTASE
1	5	1.05.0.00.0. 00.5..00	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	5	1.05.0.00.0. 00.5..00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Nilai SAKIP PD 2. Presentase BMD dalam Kondisi Baik	80,50 poin 100 persen	80,75 poin 100 persen	100,31 100
1	5	1.05.0.00.0. 00.5..00	1	2.01	0	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Kesesuaian Indikator Kinerja dalam Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja	100 persen	100 persen	100
1	5	1.05.0.00.0. 00.5..00	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100
1	5	1.05.0.00.0. 00.5..00	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1.05.0.00.0. 00.5..00	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1.05.0.00.0. 00.5..00	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1.05.0.00.0. 00.5..00	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1.05.0.00.0. 00.5..00	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	100
1	5	1.05.0.00.0. 00.5..00	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100
1	5	1.05.0.00.0. 00.5..00	1	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan	100 persen	100 persen	100

1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan	64 orang/bulan	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	100
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1.05.0.00.0.00.5..00</b>	<b>1</b>	<b>2.03</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah Dalam Database</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100</b>
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	100
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1.05.0.00.0.00.5..00</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Rata-Rata Capaian SKP ASN PD yang Memiliki Nilai &gt;=80%</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100</b>
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	2 unit	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64 orang	64 orang	100
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1.05.0.00.0.00.5..00</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100</b>
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	100

1	5	1.05.0.00.0.00.5.00	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1.05.0.00.0.00.5.00</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>	<b>0</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100</b>
1	5	1.05.0.00.0.00.5.00	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	2 unit	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5.00	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	1 unit	100
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1.05.0.00.0.00.5.00</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100</b>
1	5	1.05.0.00.0.00.5.00	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5.00	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5.00	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1.05.0.00.0.00.5.00</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>	<b>0</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Asset yang Baik</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100</b>
1	5	1.05.0.00.0.00.5.00	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit	21 unit	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5.00	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	35 unit	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5.00	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	2 unit	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5.00	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1.05.0.00.0.00.5.00</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1.05.0.00.0.00.5.00</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>	<b>0</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100</b>
1	5	1.05.0.00.0.00.5.00	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	20 laporan	20 laporan	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5.00	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	20 laporan	20 laporan	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5.00	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100

1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	457 orang	435 orang	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.01	6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Tersedia	115 unit	115 unit	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.01	9	Penyusunan SOP Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	1 laporan	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.02	0	<b>Penegakan Peraturan DaerahKabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota</b>	<b>Persentase Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100</b>
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	1 laporan	1 laporan	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 laporan	1 laporan	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 laporan	1 laporan	100
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.03	0	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100</b>
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 laporan	1 laporan	100

Secara keseluruhan capaian Rencana Kerja Satpol PP tahun 2024 ini dinyatakan berhasil karena rata-rata mencapai 100%. Berdasarkan evaluasi, secara umum ada beberapa hal yang jadi faktor pendorong dan penghambat keberhasilan, diantaranya:

1. Faktor Pendorong :

- a. Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mencukupi untuk penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat
- b. Terjalannya koordinasi dan kerjasama dengan Instansi TNI dan Polri dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat
- c. Peran aktif dan konsistensi anggota Satpol PP dan Linmas dalam menegakan Perda dan Perkada, menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung
- d. Terdapatnya SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- e. Peran aktif anggota Satpol PP dan Linmas untuk mengikuti kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM
- f. Sinergitas anggota Satpol PP dengan Jajaran Samping semakin kompak dalam pencegahan dan penanganan gangguan trantibum

2. Faktor Penghambat :

- a. Minimnya anggota satpol PP yang memiliki kompetensi PPNS, adapun kompetensi PPNS sangat dibutuhkan oleh Satpol PP dalam melakukan penegakan Perda dan Perkada
- b. Kurangnya sarana prasarana penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat
- c. Adanya parsial yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pencairan anggaran untuk kegiatan
- d. Adanya beberapa refocusing yang menyebabkan beberapa kegiatan kurang optimal pelaksanaannya

Tabel 2.2

## Target dan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2024

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DANA ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DANA ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI		PRESENTASE KINERJA DAN ANGGARAN	
								K	RP	K	RP	K	RP
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			86.737.634.224		84.343.180.593		97,24
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Nilai SAKIP PD 2. Presentase BMD dalam Kondisi Baik	80,50 poin 100 persen	28.464.179.452	80,75 poin 100 persen	26.329.154.780	100	92,50
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Kesesuaian Indikator Kinerja dalam Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 persen	240.000.000	2 dokumen	237.490.000	100	98,95
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	100.000.000	1 dokumen	97.491.800	100	97,49
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	14.999.600	100	100,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	100	100,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	14.999.600	100	100,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	15.000.000	1 laporan	14.999.800	100	100,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	30.000.000	2 dokumen	29.999.600	100	100,00

1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	50.000.000	1 laporan	49.999.600	100	100,00
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1.05.0.00.0.00.5..00</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan</b>	<b>100 persen</b>	<b>12.428.933.773</b>	<b>100 persen</b>	<b>10.458.624.011</b>	<b>100</b>	<b>84,15</b>
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/ bulan	12.328.933.773	64 orang/ bulan	10.365.971.431	100	84,08
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	35.000.000	1 laporan	31.906.880	100	91,16
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	24.220.000	1 dokumen	20.104.700	100	83,01
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	40.780.000	1 laporan	23.531.700	100	86,20
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1.05.0.00.0.00.5..00</b>	<b>1</b>	<b>2.03</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah Dalam Database</b>	<b>100 persen</b>	<b>205.000.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>40.641.000</b>	<b>100</b>	<b>99,66</b>
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	2.358.000	1 laporan	<b>204.701.850</b>	100	<b>99,85</b>
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	27.642.000	1 laporan	2.349.450	100	99,64
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1.05.0.00.0.00.5..00</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Rata-Rata Capaian SKP ASN PD yang Memiliki Nilai &gt;=80%</b>	<b>100 persen</b>	<b>175.000.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>27.622.000</b>	<b>100</b>	<b>99,93</b>
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	100.000.000	2 unit	<b>174.730.400</b>	100	<b>99,85</b>
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	25.000.000	1 paket	99.730.800	100	99,73
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	24.999.600	100	100,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64 orang	40.780.000	64 orang	50.000.000	100	100,00
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1.05.0.00.0.00.5..00</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran</b>	<b>100 persen</b>	<b>532.890.479</b>	<b>100 persen</b>	<b>513.607.647</b>	<b>100</b>	<b>96,38</b>

1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.000.000	1 paket	9.932.600	100	99,33
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	166.807.300	1 paket	165.261.000	100	99,07
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	5.000.000	1 paket	4.989.650	100	99,79
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	87.484.000	1 paket	85.322.389	100	97,53
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15.684.800	1 paket	8.120.000	100	51,77
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	15.684.800	2 dokumen	8.120.000	100	51,77
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	15.000.000	1 laporan	10.447.800	100	69,65
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	180.944.275	1 laporan	177.690.708	100	98,20
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1.05.0.00.0.00.5..00</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>	<b>0</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>14.440.667.500</b>	<b>100 persen</b>	<b>14.326.749.490</b>	<b>100</b>	<b>99,21</b>
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	5.000.000	2 unit	4.526.400	100	90,53
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	5.000.000	2 unit	4.749.600	100	94,99
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1.05.0.00.0.00.5..00</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran</b>	<b>100 persen</b>	<b>14.430.667.500</b>	<b>100 persen</b>	<b>14.317.473.490</b>	<b>100</b>	<b>99,22</b>
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	83.627.500	1 laporan	67.959.820	100	81,26
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	50.000.000	1 laporan	48.499.000	100	97,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	14.297.040.000	1 laporan	14.201.014.670	100	99,33
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1.05.0.00.0.00.5..00</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>	<b>0</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Asset yang Baik</b>	<b>100 persen</b>	<b>616.687.700</b>	<b>100 persen</b>	<b>587.981.782</b>	<b>100</b>	<b>95,35</b>

1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 unit	148.000.000	21 unit	136.444.114	100	92,19
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35 unit	338.687.700	35 unit	323.686.368	100	95,57
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.09	9	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	5.000.000	2 unit	4.960.000	100	99,20
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1 unit	100.000.000	1 unit	97.941.300	100	97,94
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	0	0	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100 persen</b>	25.000.000	<b>100 persen</b>	24.950.000	<b>100</b>	99,80
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.01	0	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 persen</b>	58.273.454.772	<b>100 persen</b>	58.014.025.813	<b>100</b>	99,55
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	20 laporan	8.259.702.952	20 laporan	8.255.869.500	100	99,95
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	20 laporan	150.000.000	20 laporan	149.760.000	100	99,84
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	104.739.000	1 dokumen	104.654.600	100	99,92
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	27.309.275.100	1 dokumen	27.307.945.650	100	100,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	457 orang	1.242.029.200	435 orang	1.235.767.050	100	99,82

1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.01	6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	17.994.368.320	1 dokumen	17.988.046.200	100	99,96
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	115 unit	187.973.600	115 unit	185.176.563	100	98,51
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.01	9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	72.926.000	100	97,23
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	225.000.000	1 Laporan	218.042.750	100	96,91
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1.05.0.00.0.00.5..00</b>	<b>2</b>	<b>2.02</b>	<b>0</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Presentase Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>100 persen</b>	<b>2.662.552.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.434.060.500</b>	<b>100</b>	<b>91,42</b>
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	1 laporan	1.275.000.000	1 laporan	1.169.336.500	100	91,71
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 laporan	220.210.000	1 laporan	219.580.000	100	99,71
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 laporan	1.167.342.000	1 laporan	1.045.144.000	100	89,53
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1.05.0.00.0.00.5..00</b>	<b>2</b>	<b>2.03</b>	<b>0</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</b>	<b>100 persen</b>	<b>62.814.600</b>	<b>100 persen</b>	<b>61.777.000</b>	<b>100</b>	<b>98,35</b>
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 laporan	62.814.600	1 laporan	61.777.000	100	98,35

Berikut ini Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (s.d. Triwulan II) Tahun 2025:

**Tabel 2.3**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung s.d. Triwulan II Tahun 2025 (T-C.29)**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Mei Tahun 2025				
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d TW.II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)			(7)		(8)=(7/6)	(9)		(10)=(5+7+10)	(11)=(10/4)
1	5	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	5	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik	80.50 100	Point Persen	76.54 40	Point Persen	80.50 100	Point Persen	80.75 100	Point Persen	100.31% 100%	80.50 100	Point Persen	78.71 64.25	Point Persen	64.25%
1	5	1	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100	Persen	40	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	64.98	Persen	64.98%
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	6.50	Dokumen	65.00%
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3.25	Dokumen	65.00%
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3.25	Dokumen	65.00%
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3.25	Dokumen	65.00%
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3.25	Dokumen	65.00%

1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3.25	Laporan	65.00%
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3.25	Laporan	65.00%
1	5	1	2.02	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen								1	Dokumen	0.25	Dokumen	12.50%
1	5	1	2.02	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	50	Data								25	Data	6	Data	12.00%
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen keuangan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>63.75</b>	<b>Persen</b>	<b>63.75%</b>
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294	Orang/Bulan	128	Orang/Bulan	64	Orang/Bulan	64	Orang/Bulan	100%	51	Orang/Bulan	192	Orang/Bulan	65.31%
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3.25	Laporan	65.00%
1	5	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3.25	Dokumen	65.00%
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	Laporan	36	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	100%	3	Laporan	54.75	Laporan	60.83%
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.03</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>65</b>	<b>Persen</b>	<b>65.00%</b>
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3.25	Laporan	65.00%
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3.25	Laporan	65.00%
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai &gt;=80%</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>61.25</b>	<b>Persen</b>	<b>61.25%</b>
1	5	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10	Unit	4	Unit						2	Unit	4	Unit	40.00%
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3	Paket	60.00%
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3.25	Dokumen	65.00%
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	320	Orang	128	Orang	64	Orang	64	Orang	100%	64	Orang	192	Orang	60.00%
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan operasional perkantoran.</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>69.38</b>	<b>Persen</b>	<b>69.38%</b>
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3.25	Paket	65.00%
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3.75	Paket	75.00%

1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3.25	Paket	65.00%
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3.25	Paket	65.00%
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	4	Paket	80.00%
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	1	Dokumen	6.25	Dokumen	62.50%
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3.75	Laporan	75.00%
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3.25	Laporan	65.00%
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>	<b>0</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>62.57</b>	<b>Persen</b>	<b>62.57%</b>
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10	Unit	4	Unit						2	Unit	4	Unit	40.00%
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	25	Unit	10	Unit						5	Unit	10	Unit	40.00%
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	Unit	4	Unit	2	Unit	2	Unit	100%	2	Unit	6	Unit	24.00%
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	2	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	3.90	Unit	39.00%
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	25	Unit	10	Unit						1	Unit	10	Unit	40.00%
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit								1	Unit	0	Unit	0.00%
1	5	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	Unit								5	Unit	0	Unit	0.00%
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>65</b>	<b>Persen</b>	<b>65.00%</b>
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3.25	Laporan	65.00%
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3.25	Laporan	65.00%
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3.25	Laporan	65.00%
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>	<b>0</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan aset yang baik</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>62.05</b>	<b>Persen</b>	<b>62.05%</b>
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	105	Unit	21	Unit	21	Unit	21	Unit	100%	21	Unit	47	Unit	44.76%
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	175	Unit	35	Unit	35	Unit	35	Unit	100%	35	Unit	78	Unit	44.57%
1	5	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	100%	2	Unit	4.50	Unit	45.00%

1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Unit	20	Unit					20	Unit	20	Unit	20.00%	
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	2	Unit	40.00%
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	2	Unit	40.00%
1	5	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	Unit	5	Unit					5	Unit	5	Unit	20.00%	
1	5	02			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>63.08</b>	<b>Persen</b>	<b>63.08%</b>
1	5	02	2.01		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>64.92</b>	<b>Persen</b>	<b>64.92%</b>
1	5	2	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3.25	Dokumen	65.00%
1	5	2	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3.25	Dokumen	65.00%
1	5	2	2.01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3.24	Dokumen	64.80%
1	5	2	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3.25	Dokumen	65.00%
1	5	2	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	700	Orang							350	Orang	17	Orang	2.43%	
1	5	2	2.01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	2	Dokumen							1	Dokumen	0	Dokumen	0.00%	
1	5	2	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	60	Orang							30	Orang	30	Orang	50.00%	
1	5	2	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	560	Orang							280	Orang	0	Orang	0.00%	
1	5	2	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	660	Orang							330	Orang	0.25	Orang	0.04%	

1	5	2	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	62	Laporan	40	Laporan	20	Laporan	20	Laporan	100%	1	Laporan	60	Laporan	96.77%
1	5	2	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	62	Laporan	40	Laporan	20	Laporan	20	Laporan	100%	1	Laporan	60	Laporan	96.77%
1	5	2	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Pengakuan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Pengakuan Perda dan Perkada yang Terlayani	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	60.00%
1	5	2	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	575	Unit	230	Unit	115	Unit	115	Unit	100%	115	Unit	419	Unit	72.87%
1	5	2	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2285	Orang	914	Orang	457	Orang	457	Orang	100%	457	Orang	1371	Orang	60.00%
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2.02</b>	<b>0</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>63.33</b>	<b>Persen</b>	<b>63.33%</b>
1	5	2	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2	Laporan								1	Laporan	0	Laporan	0.00%
1	5	2	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2	Dokumen								1	Dokumen	0.25	Dokumen	12.50%
1	5	2	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	2	Laporan								1	Laporan	0	Laporan	0.00%
1	5	2	2.02	0007	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2	Laporan								1	Laporan	0.25	Laporan	12.50%
1	5	2	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	2	Laporan								1	Laporan	0.25	Laporan	12.50%
1	5	2	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	2	Dokumen								1	Dokumen	0	Dokumen	0.00%
1	5	2	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3.25	Laporan	65.00%
1	5	2	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3.25	Laporan	65.00%

1	5	2	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3.25	Laporan	65.00%
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2.03</b>	<b>0</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>61</b>	<b>Persen</b>	<b>61.00%</b>
1	5	2	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	2	Laporan								1	Laporan	0	Laporan	0.00%
1	5	2	2.03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	2	Dokumen								1	Dokumen	0	Dokumen	0.00%
1	5	2	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	2	Dokumen								1	Dokumen	0.25	Dokumen	12.50%
1	5	2	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	2	Laporan								1	Laporan	0	Laporan	0.00%
1	5	2	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	60.00%

### **2.2.2 Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025**

Rencana Kerja untuk tahun 2025 terurai menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa untuk Program Kegiatan yang terbagi ke dalam 2 Program, 11 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2024.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi Kabupaten Bandung “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih BEDAS, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” dan Misi nomor lima yaitu “Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum”, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung mendukung misi kelima Kabupaten Bandung. Untuk mencapai Misi keempat tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai berikut:

1. Tugas yaitu :
  - 1) Menegakkan Perda dan Perkada;
  - 2) Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman; dan
  - 3) Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat
2. Fungsi, yaitu :
  - 1) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan masyarakat;
  - 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat;
  - 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;
  - 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
  - 5) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewenangan yaitu :
  - 1) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga negara masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 3) Melakukan tindakan penyelidikan pada masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Perda dan/atau Perkada; dan
- 4) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan serta perkiraan capaian program dan kegiatan, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya dukungan masyarakat Kabupaten Bandung dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.
- b. Rasio Tenaga Pengamanan kenyamanan lingkungan yang berstatus PNS terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung belum terpenuhi secara optimal.
- c. Masih kurangnya tenaga PPNS maupun tenaga yang handal sebagai pendukung pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat dikaitkan dengan pembentukan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan di Kabupaten Bandung.
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana (kendaraan roda 4) untuk pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan.
- e. Dibutuhkannya sarana kelengkapan pakaian anti huru-hara untuk penanganan unjuk rasa.
- f. Belum optimalnya inventarisasi kebutuhan SOP untuk Satpol PP.
- g. Belum adanya Gudang Barang Bukti pada Satpol PP.
- h. Belum optimalnya data orang/Badan Hukum/pengguna.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan Tugas, Fungsi dan Kewenangannya, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dimana hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas Anggota Satpol PP.
  - b. Peningkatan kemampuan teknis Anggota satpol PP dan Linmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
  - c. Peningkatan kemampuan aparatur melaksanakan tugas dan kewajibannya hingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
  - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah hingga tercapai efektifitas efisiensi.
2. Mendorong Aparat dan Masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan dengan arah kebijakan:
  - a. Membangun kemampuan dan kolektifitas Aparatur dan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
  - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
  - c. Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non pemerintah.

3. Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada Satpol PP dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan:
  - a. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
  - b. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan
  - c. Pelindungan masyarakat.
4. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kabupaten Bandung dengan arah kebijakan:
  - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Bandung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.
  - b. Menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya, antar SKPD dan masyarakat.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**

Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24) dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Komplek Pemda Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang KM.17, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat Satpol PP

Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur Penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan peraturan Perundang-undangan Daerah, dan Sumber Daya Aparatur, serta Pelindungan Masyarakat;

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai lingkup tugas;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai sub tugas yaitu :

- a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Satuan yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat, berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bandung serta dokumen Perencanaan Satuan;
- b. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP), PEnyusunan indicator kinerja utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian kinerja, Proses Bisnis (Probis), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar pelayanan (SP) Satuan serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan pertanggung jawaban akhir masa kerja Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaksanaan dan pelaporan kinerja lainnya;

- c. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan trantibum;
- d. Menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Menyelenggarakan perancangan dan pengembangan system informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan Satuan;
- f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing;
- g. Memantau pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
- h. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja Satuan;
- i. Membina bawahan sesuai dengan ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier bawahan;
- j. Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan bawahan untuk ditanda tangani;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas Satuan secara Lisan, tertulis berkala atau sesuai kebutuhan kepada pemimpin;
- m. Memberi saran dan pertimbangan pada pimpinan terkait bidang tugas Dinas;
- n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan program dan kegiatan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2024, ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan salah satunya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adanya Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pengganti Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga adanya perubahan tata cara pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum khususnya pada Satpol PP dari segi pendataan terhadap warga negara yang bakal terdampak dari penegakan Perda dan Perkada.

Terdapat 4 mutu pelayanan dasar sub urusan Trantibum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, diantaranya meliputi:

- a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. Standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat; dan
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Keempat mutu pelayanan dasar tersebut akan dilaksanakan oleh Satpol PP pada kegiatan dan sub kegiatan berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Rincian Mutu Pelayanan Dasar dalam Kegiatan/Sub Kegiatan**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Mutu Pelayanan Dasar</b>	<b>Kode Rekening/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1	Standar operasional prosedur Satpol PP	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	75.000.000
2	Standar sarana prasarana Satpol PP	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	245.712.600

3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	438.550.000
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	225.000.000

Berdasarkan mutu pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal pada Satpol PP di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk Standar Operasional Prosedur Satpol PP memiliki 82 SOP.
- b. Pada Sarana Prasarana Satpol PP kekurangan kendaraan operasional untuk melaksanakan patroli wilayah dalam penegakan Perda dan Perkada.
- c. Dari segi peningkatan Anggota Satpol PP memiliki anggaran rutin bagi pengembangan kapasitas.
- d. Adapun layanan terhadap warga yang terkena dampak gangguan Trantibum dari penegakan Perda dan Perkada, pada tahun 2024 Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tidak terjadinya kecelakaan orang maupun kerusakan barang sehingga target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang 0 (nol) ganti rugi tercapai.

Analisis kinerja pelayanan Satpol PP menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018, dengan sasaran target sesuai Renstra Satpol PP dan/atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Bandung (T-C.30)**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Presentase Penyediaan Layanan terhadap Warga Negara yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	SPM		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Sejak dibentuk pada tahun 1950 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta dengan Pembentukan Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu menjadi 4 bidang 3 seksi masing-masing bidangnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi pamong Praja dibantu oleh, yaitu:

- a. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur;

d. Bidang Perlindungan Masyarakat;

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya dukungan masyarakat Kabupaten Bandung dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
2. Rasio Tenaga Pengamanan kenyamanan lingkungan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung belum terpenuhi secara optimal.
3. Masih kurangnya jumlah anggota Linmas, berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat pada Pasal 10 Ayat 4 untuk Satgas Linmas yang berada di Kecamatan minimal berjumlah 10 orang, berarti Kabupaten Bandung membutuhkan minimal 31 Kecamatan x 10 orang = 310 orang. Sedangkan untuk Desa/Kelurahan sesuai Pasal 13 dan 19, minimal mempunyai Linmas sebanyak 5 regu dan dalam 1 regu terdiri dari minimal 5 anggota dan 1 orang komandan regu, berarti Kabupaten Bandung membutuhkan minimal anggota Linmas sebanyak 280 Desa/Kelurahan x 6 orang x 5 regu = 8.400 orang. Jadi total minimal kebutuhan Linmas Kabupaten Bandung sesuai Permendagri tersebut adalah 8.400 orang + 310 orang = 8.710 orang.
4. Masih kurangnya tenaga PPNS maupun tenaga yang handal sebagai pendukung Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum,

Ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dikaitkan dengan pembentukan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan di Kabupaten Bandung. Pemasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung terutama misi keempat. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sebelumnya *responsive* (tanggap darurat) menjadi *preventif* (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan masyarakat dalam

penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Rekomendasi strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung:

1. Peningkatan kapasitas seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, melalui pelatihan dan bimtek.
2. Tambahan tenaga pendukung Sumber Daya Manusia (Aparatur) dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung segera dapat direalisasikan. Apalagi telah terbentuknya unit pelaksanaan Satpol PP Kecamatan di Kabupaten Bandung.
3. Lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD yang bersinggungan dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan kenyamanan lingkungan di wilayah Kabupaten Bandung.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan, secara cepat, tepat, tegas dan ikhlas. Upaya yang digunakan dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan dan upaya lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Satpol PP.
5. Masih ada program yang dilaksanakan bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Merupakan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja yang dilaksanakan.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung. Dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang

tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung belum menjadi kebijakan utuh Pemerintah Kabupaten Bandung. Atas dasar tersebut, perlu ada komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bandung untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah membutuhkan personil, sarana prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiayai program maupun kegiatan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang siap siaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sendiri baik oleh instansi tingkat Provinsi maupun pusat.

**Tabel 2.5**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (T-C.31)**

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	5	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kab. Bandung			74,811,579,557.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kab. Bandung			78,393,525,404.00	
1	5	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bandung	Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik	80,85 point 100 persen	29,526,097,248.12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bandung	Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik	80,85 point 100 persen	30,287,721,608.00	
1	5	1	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 persen	217,827,146.12	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 persen	294,998,600.00	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	58,533,046.12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	81,000,000.00	
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	14,999,600.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	14,999,600.00	
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	22,499,800.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	28,000,200.00	
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	14,999,600.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	14,999,600.00	
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	22,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	28,000,000.00	
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	22,536,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	40,000,000.00	
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	41,759,900.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	68,000,000.00	
1	5	1	2.02	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	9,999,600.00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	9,999,600.00	

1	5	1	2.02	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	25 Data	9,999,600.00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	25 Data	9,999,600.00	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen keuangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>13,901,817,008.00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen keuangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>12,314,217,368.00</b>	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan	13,832,747,008.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan	12,245,147,368.00	
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20,320,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20,320,000.00	
1	5	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	30,000,000.00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	30,000,000.00	
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	18,750,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	18,750,000.00	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database</b>	<b>100 Persen</b>	<b>21,449,200.00</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database</b>	<b>100 Persen</b>	<b>21,449,200.00</b>	
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,749,600.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,749,600.00	
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,699,600.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,699,600.00	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai &gt;=80%</b>	<b>100%</b>	<b>218,199,000.00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai &gt;=80%</b>	<b>100%</b>	<b>218,199,000.00</b>	
1	5	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bandung	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bandung	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	-	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	99,999,800.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	99,999,800.00	
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	18,199,600.00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	18,199,600.00	
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64 orang	99,999,600.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64 orang	99,999,600.00	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>Persentase ketersediaan operasional perkantoran.</b>	<b>100%</b>	<b>572,084,734.00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>Persentase ketersediaan operasional perkantoran.</b>	<b>100%</b>	<b>1,212,728,734.00</b>	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26,402,100.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36,436,100.00	
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	127,487,500.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	127,487,500.00	
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21,621,434.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21,621,434.00	
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	89,437,200.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	695,047,200.00	
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bandung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	46,014,900.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bandung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	46,014,900.00	

1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	50,999,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	50,999,000.00	
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	19,930,800.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	44,930,800.00	
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	190,191,800.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	190,191,800.00	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>	<b>0</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>58,113,700.00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>119,186,500.00</b>	
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	-	
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	-	
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Kab. Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	15,092,100.00	Pengadaan Mebel	Kab. Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	15,092,100.00	
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	43,021,600.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	104,094,400.00	
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	-	
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	
1	5	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran</b>	<b>100 Persen</b>	<b>13,780,234,160.00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran</b>	<b>100 Persen</b>	<b>14,875,474,160.00</b>	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	74,935,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	74,935,000.00	
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	49,999,600.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	49,999,600.00	
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13,655,299,560.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	14,750,539,560.00	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>	<b>0</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>Persentase ketersediaan aset yang baik</b>	<b>100 Persen</b>	<b>756,372,300.00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>Persentase ketersediaan aset yang baik</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1,231,468,046.00</b>	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	97,999,900.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	170,828,646.00	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	498,373,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	900,640,000.00	
1	5	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bandung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	10,000,000.00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bandung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	10,000,000.00	

1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	49,999,600.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	49,999,600.00
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99,999,800.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99,999,800.00
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	-
1	5	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	-
					<b>Jumlah 1</b>				<b>29,526,097,248.12</b>	<b>Jumlah 1</b>				<b>30,287,721,608.00</b>
1	5	02			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kab. Bandung	<b>Persentase Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum</b>	<b>100 persen</b>	<b>45,285,482,309.00</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kab. Bandung	<b>Persentase Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum</b>	<b>100 persen</b>	<b>48,105,803,796.00</b>
1	5	02	2		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Bandung	<b>Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>	<b>100 persen</b>	<b>41,740,319,500.00</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Bandung	<b>Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>	<b>100 persen</b>	<b>44,265,730,000.00</b>
1	5	2	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	1 dokumen	43,928,000.00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	1 dokumen	109,208,000.00
1	5	2	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	25,970,281,800.00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	24,497,518,100.00
1	5	2	2.01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan Kerja Sama antarLembaga dan Kemitraandalam Teknik PencegahanKejahatan	1 dokumen	6,772,242,800.00	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan Kerja Sama antarLembaga dan Kemitraandalam Teknik PencegahanKejahatan	1 dokumen	508,730,000.00
1	5	2	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 dokumen	44,251,700.00	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 dokumen	7,974,744,800.00
1	5	2	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Kab. Bandung	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	350 orang	129,114,900.00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Kab. Bandung	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	350 orang	44,251,700.00
1	5	2	2.01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Kab. Bandung	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	1'dokumen	-	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Kab. Bandung	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	1'dokumen	129,114,900.00
1	5	2	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	30 orang	42,079,600.00	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	30 orang	-

1	5	2	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Kab. Bandung	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	280 orang	3,142,529,400.00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Kab. Bandung	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	280 orang	42,079,600.00	
1	5	2	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Bandung	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	330 orang	280,007,600.00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Bandung	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	330 orang	2,989,134,100.00	
1	5	2	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 laporan	4,357,916,400.00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 laporan	280,007,600.00	
1	5	2	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 laporan	149,760,000.00	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 laporan	6,855,616,400.00	
1	5	2	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	55,252,000.00	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	149,760,000.00	
1	5	2	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	115 unit	244,225,300.00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	115 unit	79,041,500.00	
1	5	2	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Bandung	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	457 orang	508,730,000.00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Bandung	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	457 orang	606,523,300.00	
1	5	2	2	0	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>Persentase Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>100 persen</b>	<b>3,390,492,700.00</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>Persentase Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>100 persen</b>	<b>3,760,449,687.00</b>	
1	5	2	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	104,218,800.00	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	26,895,300.00	
1	5	2	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 dokumen	34,857,700.00	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 dokumen	34,857,700.00	
1	5	2	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 unit	50,000,000.00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 unit	-	
1	5	2	2.02	0007	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	23,800,000.00	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	23,800,000.00	

1	5	2	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1 laporan	44,400,000.00	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1 laporan	18,360,000.00
1	5	2	2.02	0009	Pemberkasas Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Pemberkasas Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 dokumen	-	Pemberkasas Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Pemberkasas Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 dokumen	-
1	5	2	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	1,242,190,440.00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	1,465,170,440.00
1	5	2	2.02	0011	Penanganan Atas PelanggaranPeraturan Daerah dan PeraturanKepala daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan PelaksanaanPenanganan Atas PelanggaranPeraturan Daerah dan Peraturankepala daerah Sesuai SOP	1 laporan	1,755,645,560.00	Penanganan Atas PelanggaranPeraturan Daerah dan PeraturanKepala daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan PelaksanaanPenanganan Atas PelanggaranPeraturan Daerah dan Peraturankepala daerah Sesuai SOP	1 laporan	1,913,866,047.00
1	5	2	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	135,380,200.00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	277,500,200.00
1	5	2	2	0	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</b>	<b>100 persen</b>	<b>154,670,109.00</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</b>	<b>100 persen</b>	<b>79,624,109.00</b>
1	5	2	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Kab. Bandung	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 dokumen	-	Pembentukan Sekretariat PPNS	Kab. Bandung	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 dokumen	-
1	5	2	2.03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 dokumen	100,000,000.00	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 dokumen	24,954,000.00
1	5	2	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 laporan	-	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 laporan	-
1	5	2	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan	-	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan	-
1	5	2	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 laporan	54,670,109.00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 laporan	54,670,109.00
					<b>Jumlah 2</b>				<b>45,285,482,309.00</b>	<b>Jumlah 2</b>				<b>48,105,803,796.00</b>
									<b>74,811,579,557.12</b>					<b>78,393,525,404.00</b>

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

##### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Prioritas nasional yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025. Untuk tahun 2025, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) memuat 7 prioritas, antara lain:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Terkait dengan prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung masuk ke dalam prioritas ke-7, yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pada Provinsi Jawa Barat, yaitu “Penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah” di Kabupaten Bandung masuk dalam misi keempat yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional, dan Tata Kehidupan Masyarakat yang berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan”. Guna

mendukung pencapaian dari misi keempat Kabupaten Bandung serta tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, maka disusunlah tiga strategi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung diantaranya:

1. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Perlindungan masyarakat.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi, sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung. Untuk itu, disusun tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD.

**Tabel 3.1**

#### **Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Satpol PP**

**Tahun 2025-2029**

Visi	Misi		Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih BEDAS, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas	M5	Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Untuk itu diperlukan tindakan nyata dalam bentuk progres kedepan agar sesuai dengan peran Satpol PP Kabupaten Bandung sebagai berikut:

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya ketentraman ketertiban umum.
3. Memberdayakan Satpol PP dan PPNS menuju profesionalisme pengabdian dalam pelaksanaan tugas.
4. Menjalin kerjasama dengan aparat lainnya, serta berkoordinasi dan menjalin kemitraan dengan Polres, Kodim, Polsek dan Koramil di wilayah Kabupaten Bandung dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD lain dalam penegakan disiplin aparatur.

Adapun hal-hal yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung sebagai berikut:

- a. Berkurangnya potensi kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Bandung.
- b. Tersedianya daya dukung memungkinkan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.
- c. Meningkatnya Aparatur Satpol PP dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.
- d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatnya kemampuan aparaturnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.
2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.
3. Pemetaan kawasan rawan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Optimalisasi peran anggota Linmas.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung mencakup kepada tugas pokok dan fungsi Satpol PP itu sendiri yaitu menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan sasaran dan tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Matriks Keterkaitan Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan Upaya Pre-emptif, Preventif, dan Represif atas Pelanggaran Perda/Perkada dan Peraturan Pelaksanaannya	1. Peningkatan Kuantitas dan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah 2. Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi

		Vertikal Lainnya
	Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Peningkatan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	Meningkatkan Sinergitas Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan Satlinmas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Unsur Rakyat Terlatih Lainnya</li> <li>2. Peningkatan Kemampuan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat</li> </ol>
	Meningkatkan Profesionalitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penyidik PNS</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Teknis Anggota Satpol PP</li> <li>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Satpol PP</li> </ol>

Tabel 3.3

## Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat				Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat			Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik		Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Terselenggaranya Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			<b>Tercapainya pemenuhan dokumen pelaksanaan administrasi keuangan yang tepat waktu.</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen keuangan</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Tersedianya Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			<b>Tercapainya Kesesuaian Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
			Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			<b>Tercapainya pemenuhan dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu.</b>	<b>Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai &gt;=80%</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
			Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			<b>Tercapainya pemenuhan dokumen Pelayanan Administrasi Umum Kantor.</b>	<b>Persentase ketersediaan operasional perkantoran.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			<b>Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	

			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			<b>Tercapainya pemenuhan laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			<b>Tercapainya Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik</b>	<b>Persentase ketersediaan aset yang baik</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	

			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum				<b>Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		
		<b>Tercapainya Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Persentase Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
			<b>Tercapainya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	

			Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
			Terbentuknya Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	
			Terlaksananya uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	

			Tersedianya Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
			Tersedianya Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			Tersedianya Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
			<b>Tercapainya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	
			Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

			Tersedianya Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	
			Tersedianya Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
			Tersedianya Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	
			Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
			Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			<b>Tercapainya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	

			Tersedianya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Pembentukan Sekretariat PPNS	
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	
			Terlaksananya Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	
			Tersedianya Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
			Tersedianya Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	

### 3.3 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yaitu menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, maka program, kegiatan, dan sub kegiatannya sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025**

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)					(2)	(3)
1	5	0	0	0	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	
1	5	1	0	0	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai AKIP</b> <b>Persentase BMD dalam Kondisi Baik</b>
1	5	1	2	0	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi</b>
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	5	1	2.02	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
1	5	1	2.02	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
1	5	1	2	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen keuangan</b>
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1	5	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database</b>
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai &gt;=80%</b>
1	5	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan operasional perkantoran.</b>
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>	<b>0</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah</b>
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
1	5	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran</b>
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>	<b>0</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan aset yang baik</b>
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
1	5	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
1	5	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum</b>
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>02</b>	<b>2</b>		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>
1	5	2	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota
1	5	2	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1	5	2	2.01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
1	5	2	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan
1	5	2	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah
1	5	2	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.

1	5	2	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
1	5	2	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1	5	2	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
1	5	2	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
1	5	2	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani
1	5	2	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
1	5	2	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase Penegakan Perda dan Perkada</b>
1	5	2	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1	5	2	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1	5	2	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah
1	5	2	2.02	0007	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1	5	2	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan
1	5	2	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda
1	5	2	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1	5	2	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP

1	5	2	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</b>
1	5	2	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS
1	5	2	2.03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
1	5	2	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah
1	5	2	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS
1	5	2	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda

Adapun rumusan penetapan perubahan program dan kegiatan tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Rumusan Penetapan Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan**  
**Prakiraan Maju Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (T-C.33)**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
1	5				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					<b>74.811.579.557,12</b>	<b>78.393.525.404,00</b>	<b>DAU</b>		<b>64.680.593.600,00</b>
1	5	1	0	0	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	- Nilai AKIP - Presentase BMD dalam Kondisi Baik	<b>Kab. Bandung</b>	80,85 point 100 persen	80,85 poin 100 persen	29.526.097.248,12	30.287.721.608,00	DAU	80,95 poin 100 persen	33.853.025.889,00
1	5	1	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Indikator Kinerja dalam Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	<b>Kab. Bandung</b>	100 persen	100 persen	217.827.146,12	294.998.600,00	DAU	100 persen	260.000.000,00
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Kab. Bandung</b>	2 dokumen	2 dokumen	58.533.046,12	81.000.000,00	DAU	2 dokumen	100.000.000,00
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>Kab. Bandung</b>	1 dokumen	1 dokumen	14.999.600,00	14.999.600,00	DAU	1 dokumen	15.000.000,00

1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	1 dokumen	1 dokumen	22.499.800,00	28.000.200,00	DAU	1 dokumen	15.000.000,00
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bandung	1 dokumen	1 dokumen	14.999.600,00	14.999.600,00	DAU	1 dokumen	15.000.000,00
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	1 dokumen	1 dokumen	22.500.000,00	28.000.000,00	DAU	1 dokumen	15.000.000,00
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	1 laporan	1 laporan	22.536.000,00	40.000.000,00	DAU	1 laporan	30.000.000,00
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	1 laporan	1 laporan	41.759.900,00	68.000.000,00	DAU	1 laporan	50.000.000,00
1	5	1	2.01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 dokumen	1 dokumen	9.999.600,00	9.999.600,00	DAU	1 dokumen	10.000.000,00
1	5	1	2.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		25 Data	25 Data	9.999.600,00	9.999.600,00	DAU	25 data	10.000.000,00
1	5	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>13.901.817.008,00</b>	<b>12.314.217.368,00</b>	<b>DAU</b>	<b>100 persen</b>	<b>18.719.555.000,00</b>
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	64 orang/ bulan	64 orang/ bulan	13.832.747.008,00	12.245.147.368,00	DAU	64 orang/ bulan	18.619.555.000,00

1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	1 laporan	1 laporan	20.320.000,00	20.320.000,00	DAU	1 laporan	35.000.000,00
1	5	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Bandung	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	DAU	1 dokumen	30.000.000,00
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bandung	3 laporan	3 laporan	18.750.000,00	18.750.000,00	DAU	3 laporan	35.000.000,00
1	5	1	2.03	0	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah dalam Database</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>21.449.200,00</b>	<b>21.449.200,00</b>	<b>DAU</b>	<b>100 persen</b>	<b>30.000.000,00</b>
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	1 laporan	1 laporan	10.749.600,00	10.749.600,00	DAU	1 laporan	15.000.000,00
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	1 laporan	1 laporan	10.699.600,00	10.699.600,00	DAU	1 laporan	15.000.000,00
1	5	1	20,5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Rata-rata Capaian SKP ASN PD yang Memiliki Nilai &gt;=80%</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>218.199.000,00</b>	<b>218.199.000,00</b>	<b>DAU</b>	<b>100 persen</b>	<b>240.000.000,00</b>
1	5	1	2,05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bandung	2 unit	2 unit	-	-	DAU	2 unit	15.000.000,00
1	5	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bandung	1 paket	1 paket	99.999.800,00	99.999.800,00	DAU	1 paket	100.000.000,00
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bandung	1 dokumen	1 dokumen	18.199.600,00	18.199.600,00	DAU	1 dokumen	25.000.000,00

1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Bandung	64 orang	64 orang	99.999.600,00	99.999.600,00	DAU	64 orang	100.000.000,00
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>572.084.734,00</b>	<b>1.212.728.734,00</b>	<b>DAU</b>	<b>100 persen</b>	<b>965.381.089,00</b>
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 paket	1 paket	26.402.100,00	36.436.100,00	DAU	1 paket	10.000.000,00
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 paket	1 paket	127.487.500,00	127.487.500,00	DAU	1 paket	166.807.300,00
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bandung	1 paket	1 paket	21.621.434,00	21.621.434,00	DAU	1 paket	5.000.000,00
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 paket	1 paket	89.437.200	695.047.200,00	DAU	1 paket	200.000.000,00
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bandung	1 paket	1 paket	46.014.900,00	46.014.900,00	DAU	1 paket	75.000.000,00
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bandung	2 dokumen	2 dokumen	50.999.000,00	50.999.000,00	DAU	2 dokumen	51.000.000,00
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	1 laporan	1 laporan	19.930.800,00	44.930.800,00	DAU	1 laporan	20.000.000,00
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	1 laporan	1 laporan	190.191.800,00	190.191.800,00	DAU	1 laporan	437.573.789,00
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>58.113.700,00</b>	<b>119.186.500,00</b>	<b>DAU</b>	<b>100 persen</b>	<b>215.000.000,00</b>

1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bandung	2 unit	2 unit	-	-	DAU	2 unit	50.000.000
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bandung	5 unit	5 unit	-	-	DAU	5 unit	50.000.000,00
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bandung	2 unit	2 unit	15.092.100,00	15.092.100,00	DAU	2 unit	5.000.000,00
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	1 unit	1 unit	43.021.600,00	104.094.400,00	DAU	1 unit	5.000.000,00
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Bandung	1 unit	1 unit	-	-	DAU	1 unit	50.000.000,00
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	1 unit	1 unit	-	-	DAU	1 unit	5.000.000,00
1	5	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	5 unit	5 unit	-	-	DAU	5 unit	50.000.000,00
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>13.780.234.160,00</b>	<b>14.875.474.160,00</b>	<b>DAU</b>	<b>100 persen</b>	<b>12.778.089.800,00</b>
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bandung	1 laporan	1 laporan	74.935.000,00	74.935.000,00	DAU	1 laporan	85.000.000,00
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 laporan	1 laporan	49.999.600,00	49.999.600,00	DAU	1 laporan	50.000.000,00
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 laporan	1 laporan	13.655.299.560,00	14.750.539.560,00	DAU	1 laporan	12.643.089.800,00

1	5	1	2.09	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Asset yang Baik</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>756.372.300,00</b>	<b>1.231.468.046,00</b>	<b>DAU</b>	<b>100 persen</b>	<b>645.000.000,00</b>
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bandung	21 unit	21 unit	97.999.900,00	170.828.646,00	DAU	21 unit	150.000.000,00
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bandung	35 unit	35 unit	498.373.000,00	900.640.000,00	DAU	35 unit	350.000.000,00
1	5	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Bandung	2 unit	2 unit	10.000.000,00	10.000.000,00	DAU	2 unit	5.000.000,00
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bandung			49.999.600,00	49.999.600,00	DAU	20 unit	5.000.000,00
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 unit	1 unit	99.999.800,00	99.999.800,00	DAU	1 unit	100.000.000,00
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 unit	1 unit	-	-	DAU	1 unit	25.000.000,00
1	5	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Bandung	5 unit	5 unit	-	-	DAU	5 unit	10.000.000,00
1	5	2			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>45.285.482.309,00</b>	<b>48.105.803.796,00</b>	<b>DAU</b>	<b>100 persen</b>	<b>30.827.567.711,00</b>
1	5	2	2.01		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>41.740.319.500,00</b>	<b>44.265.730.000,00</b>	<b>DAU</b>	<b>100 persen</b>	<b>28.932.567.711,00</b>

1	5	2	2,01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	1 dokumen	1 dokumen	43.928.000,00	109.208.000,00	DAU	1 dokumen	150.000.000,00
1	5	2	2,01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	1 dokumen	1 dokumen	25.970.281.800,00	24.497.518.100,00	DAU	1 dokumen	16.449.167.711,00
1	5	2	2,01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Bandung	1 dokumen	1 dokumen	6.772.242.800,00	508.730.000,00	DAU	1 dokumen	4.208.400.000,00
1	5	2	2,01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Kab. Bandung	1 dokumen	1 dokumen	44.251.700,00	7.974.744.800,00	DAU	1 dokumen	75.000.000,00
1	5	2	2,01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Kab. Bandung	350 orang	350 orang	129.114.900,00	44.251.700,00	DAU	350 orang	350.000.000,00
1	5	2	2,01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Kab. Bandung	1 dokumen	1 dokumen	0,00	129.114.900,00	DAU	1 dokumen	50.000.000,00
1	5	2	2,01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Kab. Bandung	30 orang	30 orang	42.079.600,00	0,00	DAU	30 orang	75.000.000,00

1	5	2	2,01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Bandung	280 orang	280 orang	3.142.529.400,00	42079600	DAU	280 orang	750.000.000,00
1	5	2	2,01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Bandung	330 orang	330 orang	280.007.600,00	2.989.134.100,00	DAU	330 orang	350.000.000,00
1	5	2	2,01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Bandung	1 laporan	1 laporan	4.357.916.400,00	280.007.600,00	DAU	1 laporan	4.000.000.000,00
1	5	2	2,01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Bandung	1 laporan	1 laporan	149.760.000,00	6.855.616.400,00	DAU	1 laporan	150.000.000,00
1	5	2	2,01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Bandung	1 laporan	1 laporan	55.252.000,00	149.760.000,00	DAU	1 laporan	125.000.000,00
1	5	2	2,01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kab. Bandung	115 unit	115 unit	244.225.300,00	79.041.500,00	DAU	115 munit	1.600.000.000,00

1	5	2	2,01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Bandung	457 orang	457 orang	508.730.000,00	606.523.300,00	DAU	457 orang	600.000.000,00
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2.02</b>	<b>0</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>Kab. Bandung</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>3.390.492.700,00</b>	<b>3.760.449.687,00</b>	<b>DAU</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.475.000.000,00</b>
1	5	2	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	1 laporan	1 laporan	104.218.800,00	26.895.300,00	DAU	1 laporan	150.000.000,00
1	5	2	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	1 dokumen	1 dokumen	34.857.700,00	34.857.700,00	DAU	1 dokumen	50.000.000,00
1	5	2	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Bandung	1 unit	1 unit	50.000.000,00	-	DAU	1 unit	250.000.000,00
1	5	2	2.02	0007	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	1 laporan	1 laporan	23.800.000,00	23.800.000,00	DAU	1 laporan	100.000.000,00
1	5	2	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Kab. Bandung	1 laporan	1 laporan	44.400.000,00	18.360.000,00	DAU	laporan	75.000.000,00
1	5	2	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Kab. Bandung	1 dokumen	1 dokumen	-	-	DAU	1 dokumen	50.000.000,00
1	5	2	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	Kab. Bandung	1 laporan	1 laporan	1.242.190.440,00	1.465.170.440,00	DAU	1 laporan	200.000.000,00
1	5	2	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali	Kab. Bandung	1 laporan	1 laporan	1.755.645.560,00	1.913.866.047,00	DAU	1 laporan	300.000.000,00



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung adalah sebagai SKPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Sejalan dengan Misi ke-lima Kabupaten Bandung, maka program dan kegiatan yang dirancang pada Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025 terdiri dari :

**Tabel 4.1**  
**Rekapitulasi Anggaran Belanja berdasarkan Program dan Kegiatan**  
**Penetapan Perubahan Tahun 2025**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024							
			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			74.811.579.557,12	78.393.525.404,00	
1	5	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			74.811.579.557,12	78.393.525.404,00	
1	5	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	- Nilai AKIP  - Presentase BMD dalam Kondisi Baik	80,85 point  100 persen	80,85 point  100 persen	29.526.097.248,12	30.287.721.608,00
1	5	1	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Indikator Kinerja dalam Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100 persen	100 persen	217.827.146,12	294.998.600,00
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	58.533.046,12	81.000.000,00
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	14.999.600,00	14.999.600,00
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	22.499.800,00	28.000.200,00
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	14.999.600,00	14.999.600,00
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	1 dokumen	22.500.000,00	28.000.000,00

						Dokumen Perubahan DPA-SKPD					
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	22.536.000,00	40.000.000,00	
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	41.759.900,00	68.000.000,00	
1	5	1	2.02	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	1 dokumen	9.999.600,00	9.999.600,00	
1	5	1	2.02	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	25 data	25 data	9.999.600,00	9.999.600,00	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>13.901.817.008,00</b>	<b>12.314.217.368,00</b>	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan	64 orang/bulan	13.832.747.008,00	12.245.147.368,00	
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	20.320.000,00	20.320.000,00	
1	5	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	18.750.000,00	18.750.000,00	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.03</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah dalam Database</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>21.449.200,00</b>	<b>21.449.200,00</b>	
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	10.749.600,00	10.749.600,00	
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	10.699.600,00	10.699.600,00	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Rata-rata Capaian SKP ASN PD yang Memiliki Nilai &gt;=80%</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>218.199.000,00</b>	<b>218.199.000,00</b>	
1	5	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	2 unit	-	-	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	99.999.800,00	99.999.800,00	
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	18.199.600,00	18.199.600,00	
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64 orang	64 orang	99.999.600,00	99.999.600,00	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>572.084.734,00</b>	<b>1.212.728.734,00</b>	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	26.402.100,00	36.436.100,00	

1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	127.487.500,00	127.487.500,00
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	21.621.434,00	21.621.434,00
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	89.437.200,00	695.047.200,00
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	46.014.900,00	46.014.900,00
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	50.999.000,00	50.999.000,00
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	19.930.800,00	44.930.800,00
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	190.191.800,00	190.191.800,00
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>	<b>0</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>58.113.700,00</b>	<b>119.186.500,00</b>
1	5	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	2 unit	-	-
1	5	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	5 unit	-	-
1	5	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeuler yang Dibeli	2 unit	2 unit	15.092.100,00	15.092.100,00
1	5	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dibeli	1 unit	1 unit	43.021.600,00	104.094.400,00
1	5	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	-	-
1	5	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	-	-
1	5	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	-	-
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>13.780.234.160,00</b>	<b>14.875.474.160,00</b>
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	74.935.000,00	74.935.000,00
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	49.999.600,00	49.999.600,00
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	13.655.299.560,00	14.750.539.560,00
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>	<b>0</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Asset yang Baik</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>756.372.300,00</b>	<b>1.231.468.046,00</b>
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	97.999.900,00	170.828.646,00

1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	35 Unit	498.373.000,00	900.640.000,00
1	5	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	49.999.600,00	49.999.600,00
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	99.999.800,00	99.999.800,00
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	1 unit	-	-
1	5	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	-	-
1	5	2			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>45.285.482.309,00</b>	<b>48.105.803.796,00</b>
1	5	2	2.01		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>41.740.319.500,00</b>	<b>44.265.730.000,00</b>
1	5	2	2.01	00 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	43.928.000,00	109.208.000,00
1	5	2	2.01	00 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	1 dokumen	25.970.281.800,00	24.497.518.100,00
1	5	2	2.01	00 06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	1 dokumen	6.772.242.800,00	508.730.000,00
1	5	2	2.01	00 08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 dokumen	1 dokumen	44.251.700,00	7.974.744.800,00
1	5	2	2.01	00 10	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	350 orang	350 orang	129.114.900,00	44.251.700,00
1	5	2	2.01	00 11	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	1'dokumen	1'dokumen	-	129.114.900,00

1	5	2	2,01	00 12	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	30 orang	30 orang	42.079.600,00	-
1	5	2	2,01	00 13	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	280 orang	280 orang	3.142.529.400,00	42.079.600,00
1	5	2	2,01	00 14	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	330 orang	330 orang	280.007.600,00	2.989.134.100,00
1	5	2	2,01	00 15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 laporan	1 laporan	4.357.916.400,00	280.007.600,00
1	5	2	2,01	00 16	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 laporan	1 laporan	149.760.000,00	6.855.616.400,00
1	5	2	2,01	00 17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	1 laporan	55.252.000,00	149.760.000,00
1	5	2	2,01	00 18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	115 unit	115 unit	244.225.300,00	79.041.500,00
1	5	2	2,01	00 25	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	457 orang	457 orang	508.730.000,00	606.523.300,00
1	5	2	2,02		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota</b>	<b>Persentase Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>3.390.492.700,00</b>	<b>3.760.449.687,00</b>
1	5	2	2,02	00 04	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	1 laporan	104.218.800,00	26.895.300,00
1	5	2	2,02	00 05	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan	1 dokumen	1 dokumen	34.857.700,00	34.857.700,00

					Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah							
1	5	2	2,02	00 06	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 unit	1 unit	50.000.000,00	-			
1	5	2	2,02	00 07	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	1 laporan	23.800.000,00	23.800.000,00			
1	5	2	2,02	00 08	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1 laporan	1 laporan	44.400.000,00	18.360.000,00			
1	5	2	2,02	00 09	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 dokumen	1 dokumen	-	-			
1	5	2	2,02	00 10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	1 laporan	1.242.190.440,00	1.465.170.440,00			
1	5	2	2,02	00 11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 laporan	1 laporan	1.755.645.560,00	1.913.866.047,00			
1	5	2	2,02	00 12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	1 laporan	135.380.200,00	277.500.200,00			
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2,03</b>		<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>154.670.109,00</b>	<b>79.624.109,00</b>			
1	5	2	2,03	00 02	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 dokumen	1 dokumen	-	-			
1	5	2	2,03	00 03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00	24.954.000,00			
1	5	2	2,03	00 04	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 laporan	1 laporan	-	-			
1	5	2	2,03	00 05	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan	1 laporan	-	-			
1	5	2	2,03	00 06	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 laporan	1 laporan	54.670.109,00	54.670.109,00			

**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, ketertiban, ketentraman, serta perlindungan masyarakat sebagai wujud nyata tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban, ketentraman, serta perlindungan masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Bandung khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Soreang, Juni 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANDUNG

MOCHAMAD USMAN

BUPATI BANDUNG

TTD

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

**FORMULIR E.70**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA PERUBAHAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2025**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Sesuai
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyusun agenda kerja.	✓			
2	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.	✓			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	✓			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	✓			
6	Penelaahan Rancangan Awal RKPD Kabupaten/Kota.	✓			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8	Penelaahan usulan masyarakat.		✓		
9	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	✓			

10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/Kota.	✓			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	✓			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Surat Edaran Bupati/Wali Kota.	✓			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan, dan penganggaran terpadu.	✓			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam	✓			

	forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.				
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota telah Menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan.				

Soreang, Juni 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANDUNG**

**MOCHAMAD USMAN, S.Sos., M.Si**

**Pembina Utama Muda  
NIP.197110091991011001**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Raya Soreang Km.17 Telp./Fax. (022) 5891634 Soreang 40912  
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, E-mail : [satpolpp@bandungkab.go.id](mailto:satpolpp@bandungkab.go.id)  
Website : [www.bandungkab.go.id](http://www.bandungkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN BANDUNG**

Nomor : 800/1417/SatpolPP/2025  
Lampiran : 1 (satu) lembar

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2025**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, perlu disusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 telah mendapatkan pengesahan dari Bupati Bandung;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;

21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025;
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Struktur Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025 dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Soreang  
Pada Tanggal : 3 Juni 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANDUNG**

**MOCHAMAD USMAN, S.Sos., M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.197110091991011001**

Lampiran

Nomor : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  
: Bandung  
800/1417/SatpolPP/2025  
Tanggal : 3 Juni 2025  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2025**

Penanggungjawab : Kepala Satpol PP  
Ketua Tim : Sekretaris Satpol PP  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program

Tim Pelaksana : 1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman  
Masyarakat  
2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-  
undangan Daerah  
3. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Aparatur  
4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat  
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
6. Kepala Sub Bagian Keuangan  
7. Fungsional Satpol PP  
8. Staff pada Sub Bagian Program

Ditetapkan di : Soreang  
Pada Tanggal : 3 Juni 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANDUNG**

**MOCHAMAD USMAN, S.Sos., M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.197110091991011001**